

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era milenial seperti saat ini kebutuhan informasi di masyarakat sangat penting dan bersifat vital dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi tanpa dibatasi waktu dan jarak. Dengan perkembangan teknologi komunikasi, dunia dianalogikan sebagai “desa global” atau “kampung global” sehingga informasi menjadi sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang (wahyudiyono, 2016).

Inggris dan Jepang telah mempersiapkan teknologi 5G sedangkan Indonesia koneksi 4G masih belum merata keseluruh wilayah negaranya, pesatnya perkembangan internet telah menjadi teknologi yang tidak hanya mentransmisikan informasi namun juga menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya (Nisa, 2014).

Di Indonesia sendiri informasi merupakan kebutuhan utama serta dengan kemudahan yang mendapatkan informasi mengakibatkan rasa ingin tahu yang tinggi akan informasi yang terbaru dari penjuru dunia dan merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya itu juga merupakan salah satu ciri dari Negara demokrasi.

Data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi menyebutkan, pengguna media informasi dan komunikasi berbasis internet terutama media sosial di Indonesia merupakan peringkat ke-6 di dunia (Jhon, 2017). Survei yang dilakukan Sosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) yang dilakukan sepanjang 2016 menemukan 132,7 juta jiwa dari 256,2 juta jiwa orang lebih dari setengah penduduk di Indonesia menggunakan internet. Pengguna internet di Indonesia mengakses internet dengan berbagai cara terbagi menjadi 67,2 juta orang atau 50,7% mengakses menggunakan perangkat genggam dan komputer, 63,1 juta orang atau 47,6% mengakses hanya menggunakan smartphone dan 2,2 juta orang atau 1,7% mengakses hanya menggunakan komputer (Widiartanto, 2016). Teknologi

informasi adalah sebuah inovasi alat untuk memudahkan manusia dalam mengelola data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas sesuai dengan fakta.

Negara Indonesia sendiri yang bertanggung jawab untuk masalah komunikasi dan informasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pekerjaan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di daerah kabupaten /kota di bantu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Dinas Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan kepentingan daerah di bidang komunikasi dan teknologi informasi serta melaksanakan tugas pembantu yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi yang selalu berkaitan dengan sistem informasi. Pembagian tugas yang sudah terlaksana sampai saat ini masih di rasa kurang karena tidak semua warga Negara mendapat informasi yang sama di setiap daerah karena sumber daya manusia sadar pentingnya sistem informasi dan jaringan informasi yang mendukung berbeda setiap daerahnya. Dari survei yang dilakukan APJII penggunaan internet untuk setiap pulau besar di Indonesia tercatat 86,3 juta orang atau 65% di pulau Jawa, 20,7 juta atau 15,7% di Sumatra, 8,4 juta atau 6,3% di Sulawesi, 7,6 juta atau 5,6% di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7% di Bali dan NTB, dan 3,3 juta atau 2,5% di Maluku dan Papua (wahyudiyono, 2016). Belum terjadinya pemerataan di seperti data di atas mengakibatkan informasi tidak tersampaikan secara merata danimbang untuk setiap daerah. Perlu adanya peningkatan kualitas jaringan internet sehingga tidak terjadi kesenjangan internet di Indonesia.

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan hambatan informasi di masyarakat pemerintah telah menerbitkan Permen Kominfo No.17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Sebagai tindak lanjut untuk kebijakan tersebut di keluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.08/Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial. Lembaga komunikasi sosial adalah lembaga komunikasi pedesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media dan lembaga komunikasi organisasi profesi. Sedangkan

lembaga komunikasi pedesaan adalah kelompok informasi masyarakat atau kelompok sejenisnya yang di singkat KIM yang di bentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai salah fasilitas bagi masyarakat untuk mendapat informasi. Fasilitator komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Di kabupaten ponorogo sendiri ada delapan Kelompok Informasi Masyarakat yang masih aktif yaitu KIM Batoro Katong, KIM Pariwara, KIM Karanglo Kidul Jurnalis, KIM Suara Bekare, KIM Wartasari, KIM Karang Patihan Bangkit, KIM Nongkodono Information Center dan KIM Patihan Bangkit.

Dalam penelitian ini, ingin diteliti lebih mendalam tentang Kelompok Informasi Masyarakat yang hasilnya disusun dalam bentuk dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Ponorogo”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut.

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Ponorogo?
2. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Agar peneliti dapat lebih terfokus dan tepat sasaran berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Ponorogo
2. Kendala Implementasi Kebijakan Pemerintah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari penulis serta syarat kelulusan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau kajian bagi para pembaca yang ingin mengetahui atau melakukan penelitian yang sama mengenai Implementasi Kebijakan Kelompok Inforamasi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

E. Penegasan Istilah

Demi menghindari pelebaran makna serta kesalahan pahaman pembaca dalam memahami istilah yang di pakai dalam ini. perlu dibuat penjelasan terhadap istilah terebut, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan upaya dari pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. (Suharmo, 2013)

2. Kebijakan Publik

Keputusan dari otoritas tertinggi dalam sebuah Negara yang harus di laksanakan oleh setiap mayarakat dalam negara tersebut untuk mewujudkan tujuan tertentu di dalam masyarakat (Taufiqurakhman, 2014).

3. Kelompok Informasi Masyarakat

Kelompok informasi masyarakat merupakan kependekan dari KIM yaitu lembaga dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berfokus pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat (kominfo ponorogo, 2018)

F. Landasan Teori

1. Kebijakan

a) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses panjang yang terjadi secara direncanakan maupun tidak sengaja. Menjaga kaidah nilai sosial yang

berlaku dengan generasi tua mensosialisasikan kepada generasi lebih muda tentang nilai-nilai sosial yang ada sedangkan lembaga negara yang berlaku sebagai agen sosialisasi yang menjaga nilai-nilai sosial maupun politik (Solihat, 2008) .

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai proses belajar, seperti mengenai peran, norma dan nilai dalam lingkungan sosial. Proses memperkenalkan sistem kepada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menanggapi dan beraksi terhadap sistem tersebut dengan demikian juga menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem (Djuyandi, 2014)

Sosialisasi merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah kebijakan kepada masyarakat dan masyarakat mengetahui, paham dan dapat melakukan isi dari kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai (Deardo, 2015).

Dari pendapat para ahli di atas sosialisasi dapat di artikan proses penyampaian informasi berkaitan dengan norma, nilai sosial, program, kebijakan kepada orang lain, sehingga mendapat tanggapan dan partisipasi dari masyarakat sehingga tujuan dapat tercapai.

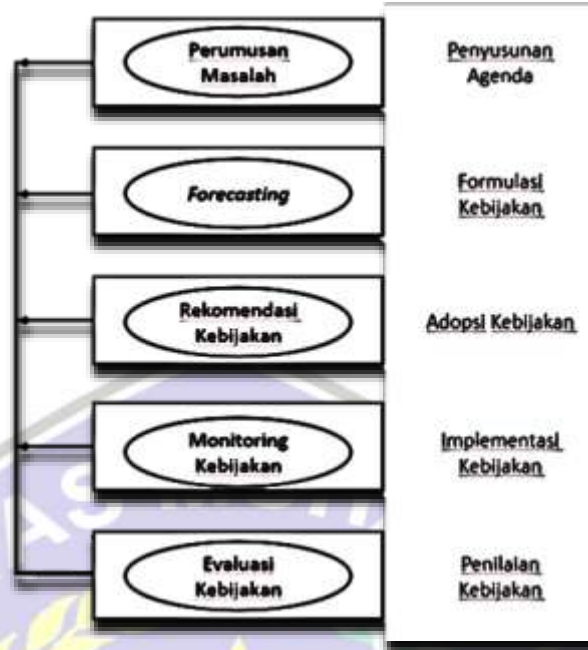
b) Proses

Proses kebijakan yaitu model pendekatan kebijakan publik yang dimaknai sebagai aktivitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan yang berujung pada evaluasi kebijakan. Secara singkat menformulasi kebijakan dengan setandar-standar yang harus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan minimal sesuai apa yang hendak di capai (agustino, 2008).

Preoses kebijakan merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui, kegiatan ini terletak di antrara perumusan dan evaluasi kebijakan (tachjan, 2006).

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang politis yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Subarsono, 2015).

Gambar 1.1 Proses Kebijakan Publik



Sumber: (Subarsono, 2015)

c) Implementasi

Implementasi kebijakan yaitu suatu proses yang kompleks dan dinamis. Secara kompleks tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi kepentingan sedangkan proses yang dinamis dimana pelaksanaan kebijakan melakukan kegiatan yang mengarah untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan dan sasaran dari kebijakan. Tetapi harus di garis bawah implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dan pencapaian dari tujuan dari kebijakan (agustino, 2008).

Implementasi kebijakan merupakan upaya dari pemerintah untuk melaksanakan tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan beraneka ragam, baik dalam hal sasaran, bidang bahkan kepentingan yang memaksa pemerintah untuk menggunakan kewenangan diskresi (Suharmo, 2013).

Dalam sistem politik kebijakan diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

pemerintah yang berdampak langsung pada warga negaranya. Dalam prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat undang-undang yang terlalu meluas dan bersifat ambigu, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat diskresi, untuk memutuskan dilakukan atau tidak dilakukan. (Subarsono, 2015).

Dari pendapat para ahli di atas implementasi dapat di simpulkan merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan program-programnya dengan melalui badan-badan pemerintahan yang berdampak langsung pada warga negaranya untuk mendapatkan hasil sesuai tujuan dan sasaran dari kebijakan.

d) Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkatan kinerja suatu kebijakan setelah kebijakan berjalan beberapa waktu yang cukup. Semakin strategis suatu kebijakan maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang sebab evaluasi terlalu dini mengakibatkan *outcome* dan dampak dari kebijakan tidak nampak (Subarsono, 2015).

Evaluasi adalah kegiatan memberikan satuan-satuan nilai terhadap kebijakan yang sudah diimplementasikan juga menjadi perbaikan atau masukan untuk kebijakan berikutnya. Kegiatan evaluasi tidak sekedar mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan tidak juga tentang hasil kebijakan tetapi mencakup ketercapaian sasaran dan tujuan kebijakan (Suharmo, 2013).

Evaluasi kebijakan membahas tentang persoalan, isi, implementasi dan pengaruh dari kebijakan. Evaluasi kebijakan diupayakan menghasilkan rekomendasi dan penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang di evaluasi. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat di gunakan untuk memperbaiki kebijakan dan program yang sudah berjalan dan berlangsung juga untuk membantu merencanakan kebijakan di masa depan (agustino, 2008).

Pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah sebuah kegiatan untuk mengukur nilai tingkat keberhasilan

kebijakan yang sudah berjalan dan hasil nilai digunakan untuk perbaikan dan penyusunan kebijakan kedepannya.

2. Kelompok Informasi Masyarakat (kominfo ponorogo, 2018)

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga di bentuk dan di kelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berfokus pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat. KIM berlokasi di perkotaan dan pedesaan yang terdiri 3 sampai 30 anggota yang terdiri dari berbagai kalangan baik remaja, orang dewasa, pedagang, pelajar, petani atau nelayan (Johantan, 2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi RI no. 08/PER/M.KOIMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 juni 2010 Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau sejenisnya adalah kelompok yang di bentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Kelompok informasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang mengelola masalah informasi komunikasi antar masyarakat, lembaga ini juga berperan sebagai media lokal yang mempublikasi informasi kegiatan yang ada di masyarakat sekitar sekaligus media komunikasi antar warga.

Dasar hukum itu sendiri diatur dalam PP no. 38 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi RI no 17 tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 17 maret 2009 dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi RI no. 08/PER/M.KOIMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 juni 2010.

Dalam pelaksanaannya program Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo juga memiliki visi, misi dan tujuan sendiri. Visi dari Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo adalah terwujudnya Kelompok Informasi Masyarakat yang inovatif dalam meningkatkan nilai

tambah bagi masyarakat melalui pendayagunaan informasi dan komunikasi dalam rangka mencapai masyarakat informasi yang sejahtera. Misi Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri yaitu:

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Kelompok Informasi Masyarakat secara mandiri sebagai wahana informasi dalam masyarakat,
- b. Meningkatkan peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam memperlancar arus informasi antar pemerintah dengan masyarakat dan anatar golongan masyarakat,
- c. Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan Masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dalam rangka literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi
- d. Mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah masyarakat, dan
- e. Meningkatkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Kelompok Informasi Masyarakat itu sendiri adalah

- a. Sebagai Wahana Informasi Antar anggota KIM secara horizontal, KIM ke pemerintah Kabupaten Ponorogo secara *Bottom-up* dan Pemerintah kabupaten ponorogo kepada masyarakat secara *Top – Down*
- b. Sebagai mitra dialog dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik.
- c. Sebagai peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.
- d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi

Dalam terbentuknya KIM memiliki proses dari program kerja Diskominfo dengan membentuk tim yang konsen dalam pembentukan dan pembimbingan KIM. Tim kemudian melakukan pemetaan di kecamatan atau

desa yang memiliki potensi dapat didirikan KIM, setelah lokasi di dapatkan Diskominfo memohon ijin untuk membetuk KIM di desa/kelurahan tersebut. Saat ijin sudah didapatkan Diskominfo melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat kemudian warga masyarakat membentuk KIM dan membuat website atau blog. Desa kemudian membuat SK untuk organisasi KIM tersebut dan di daftarkan ke Diskominfo, untuk mempermudah dapat dilihat pada gambar dibawah,

Gambar 1.2 Alur Pembentukan KIM



(Sumber: Data Primer Diskominfo)

G. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah penjabaran karakteristik yang berdasarkan sesuatu yang diamati yang merupakan kunci dari definisi oprasional. Penjabaran karakteristik dapat dilakukan dengan melakukan observasi dan pengukuran secara cermat terhadap penelitian berjudul “Implementasi kebijakan pemerintah kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Ponorogo”. Definisi Oprasional digunakan untuk memberikan gambaran pengukuran variabel.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tetukan oleh banyaknya variabel atau faktor, dan masing-masing variabel saling berhubungan satu sama

lain. Penelitian dengan menggunakan indikator menurut Edwards III yang menyatakan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variable yaitu:

- 1) *Komunikasi*, untuk menjamin keberhasilan kebijakan harus di informasikan berkaitan dengan tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) *Sumber daya*, sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat berwujud kompetensi implementor dan sumberdaya finansial sehingga implementasi sesuai yang diharapkan
- 3) *Disposisi* menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti: komitmen, sifat demokrasi dsb.
- 4) *Struktur birokrasi*, struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan memiliki pengaruh yang besar terhadap implentasi kebijakan (Subarsono, 2015).

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian terkait dari pengimplementasian kebijakan pemerintah kelompok informasi masyarakat yang berada di kabupaten ponorogo. Penelitian ini mengambil lokasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan melakukan pertimbangan dengan menggunakan beberapa kriteria yang dikehendaki telah ada dalam objek penelitian. (Idrus, 2009).

Kriteria yang menentukan lokasi penelitian adalah telah terdaftar pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur saat dilakukanya penelitian. Menurut kriteria tersebut dari Sembilan KIM yang terdaftar di Dinas Kominfo kabupaten ponorogo terdapat enam KIM yang memenuhi kriteria. enam tempat tersebut adalah KIM Suara Bekare di Jl. Jendral Sudirman Desa Bekare, KIM Parawira di Jl. Onggo Joyo no.01 Desa Kalimalang, KIM Batoro Katong di Jl. Syuhada II Desa Ngunut, KIM Warta Sari di Desa Campursari, KIM Karanglo Kidul Juornalis di Jl. Kembang Sore no.85 Desa Karanglo Kidul, KIM Karang Patihan Bangkit di Desa Karang Patihan dan Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten Ponorogo.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Diskriptif Kualitatif. Diskriptif kualitatif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data di dapat dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Dengan penyusunan teori dari bawah ke atas, yaitu sejumlah data yang banyak dikumpulkan dan saling berhubungan (moleong, 2014).

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan obsevasi lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian diolah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kelompok informasi masyarakat di kabupaten ponorogo dengan istilah lain menggunakan data primer dan skunder.

Data primer adalah data teks hasil wawancara dengan informan yang berupa rekaman video atau audio, catatan tertulis bisa juga berupa foto. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar (sarwono, 2006). Sumber data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung lapangan, sedangkan data pendukung di dapat melalui dokumentasi dari sumber lain seperti artikel, surat kabar, media sosial dan lain sebgainya guna memperbanyak data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan skunder, untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik:

a) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin serta sejelas-jelasnya kepada objek penelitian (gunawan, 2015) . Wawancara merupakan penggalian informai dengan melakukan Tanya jawab antara pewawancara atau *interviewer* dan yang memberi jawaban atau *interviewee*. Wawancara di bagi menjadi

dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memiliki arti sebelum melakukan wawancara penanya menetapkan masalah-masalah yang akan diajukan sebagai pertanyaan. Wawancara tidak terstruktur sendiri merupakan wawancara tanpa adanya persiapan dan dilakukan secara spontanitas dilapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana sebelum wawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan namun pada pelaksanaannya disesuaikan dengan responden

b) Observasi

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian, perilaku, objek dan hal-hal lain yang mendukung penelitian (sarwono, 2006). Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (gunawan, 2015). Observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau *observer* dan objek yang di observe atau *observee*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya mengamati secara langsung objek tetapi tidak terlibat dan ikut secara langsung.

Sedangkan mengumpulkan data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian (gunawan, 2015). Dokumentasi dilakukan dengan mencari data pendukung yang sesuai dengan tema yang diteliti. Studi pustaka digunakan untuk menunjang kelengkapan data dalam penelitian dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan yang relevan.

5. Teknik Pemilihan Informan

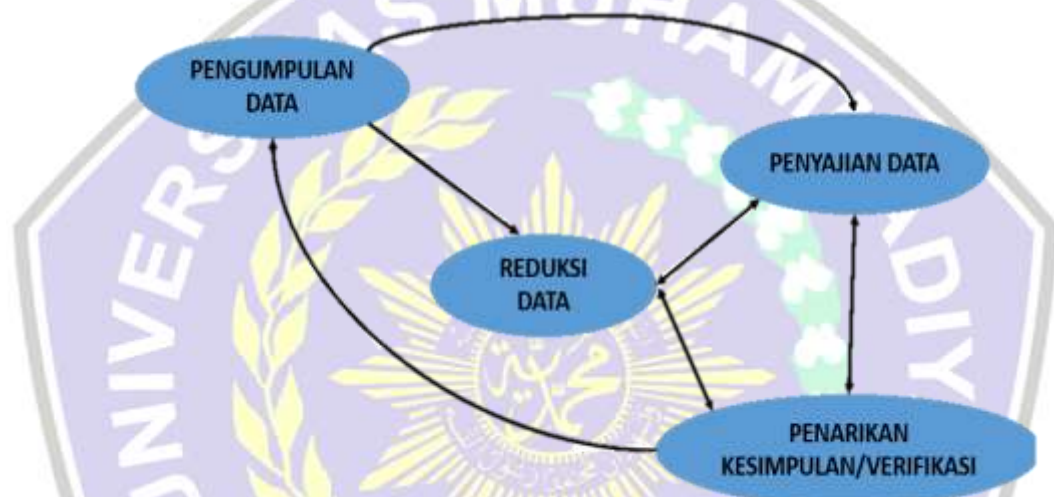
Penelitian ini menggunakan teknik *non probabilitas*, yaitu pengambilan sample tidak didasarkan pada rumus statistik tetapi pada pertimbangan subyektif peneliti dengan didasarkan jangkauan dan kedalaman masalah yang diteliti (sarwono, 2006). Teknik yang di gunakan untuk memilih informan menggunakan *teknik bola salju*, yaitu memilih unit

atau responden yang di rekomendasikan dari responden sebelumnya. Sempel yang akan digunakan dalam penelitian ini seluruh ketua KIM ponogoro dan masyarakat sekitar sekretariat KIM.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalapenelitian ini mengukan analisis data yang dikemukakan oleh miles dan Huberman dalam (basrowi & suwandi, 2008) mencakup tiga kegiatan bersamaan: (1) reduksi data (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

Gambar 1.3 Analisi Data Miles Dan Huberman



(Sumber: data Sekunder (Romadhoni, 2017))

Model analisis seperti diatas peneliti memiliki tiga kegiatan pengumpulan data. Dengan adanya empat poin peneliti harus aktif selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik dalam proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) selama penelitian. Proses analisis penelitian ini dilakukan terus berulang dan terus berlanjut selama pengambilan data berlanjut sampai penelitian siap dikerjakan baru proses tersebut berakhir.

Berikut adalah Penjabaran dari masing-masing proses pengumpulan data,

a) Pengumpulan Data

Proses reduksi data adalah pengumpulan data berupa dokumen, foto dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat bantu alat perekam dan alat pencatat.

b) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan pengolahan data kasar dari lapangan yang berlangsung dari awal sampai akhir. Proses reduksi data dimaksud untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang bagian yang tidak di butuhkan sehingga penarikan kesimpulan yang kemudian masuk keproses verifikasi data.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun yang memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ini juga dilakukan display data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan diteliti sehingga yakin saat dipaparkan.

d) Penarikan Kesimpulan /Verifikasi

Kesimpulan merupakan arti dari data yang telah diteliti dan juga di verifikasi secara langsung selama penelitian. Cara yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan berupa melakukan pencatatan untuk pola tema yang sama, mengelompokkan dan mencari penyimpangan atau perbedaan dari yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan sebelumnya.

7. Validitas Data

Validitas data merupakan bagian dalam sebuah penelitian dimana hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Pemeriksaan kebenaran data dalam penelitian ini menggunakan *Triangulasi data*.

Triangulasi data adalah pengumpulan informasi dengan berbagai metode (alwasilah, 2012). Triangulasi data merupakan cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda

sebagai data pembanding (gunawan, 2015) . Dapat disimpulkan triangulasi data merupakan validitas data dengan menggunakan dua metode atau lebih sebagai data pembanding.

Membandingkan informasi yang diperoleh peneliti dari masing-masing informan. Informasi yang diperoleh Diskominfo, dari masing-masing KIM dan masyarakat yang akan dibandingkan, nantinya akan dianalisis mengenai persamaan ataupun perbedaan informasi yang diperoleh peneliti.

